

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu pemerintahan sebaiknya menjalankan urusan pemerintahannya dengan mengimplementasikan konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan istilah *Good Governance*. Menurut Sadjijono (2007), *Good Governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut salah satunya bisa diwujudkan dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpegang pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Menurut bagian menimbang huruf a pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan serta

mengembangkan pelayanan publik dan perekonomian nasional juga daerah. Oleh karenanya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pengadaan jasa pekerjaan konstruksi sering dilakukan dengan mekanisme tender yang diikuti oleh banyak peserta tender. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.

Pada tahun ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung sedang melakukan pekerjaan konstruksi renovasi rumah negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung adalah unit operasional yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan RI. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Tujuan utama di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kekayaan negara merupakan alat bagi negara untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya dibutuhkan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik yang salah satunya berasal dari peran pejabat dan pegawai negeri yang kompeten dan berkualitas. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut, salah satu cara yang

dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung adalah dengan melaksanakan pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara.

Namun, berdasarkan informasi pengadaan pada laman website [lpse.kemenkeu.go.id](http://lpse.kemenkeu.go.id), pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung terdapat status evaluasi ulang. Dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa evaluasi ulang dalam pengadaan dapat terjadi dikarenakan beberapa kondisi tertentu yaitu jika pokja pemilihan melakukan kesalahan saat evaluasi, sebagai tindak lanjut sanggah/sanggah banding yang diterima oleh pokja pemilihan dan apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Selain itu, pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung mempunyai nilai pagu paket pengadaan yang cukup besar yaitu sebesar Rp462.645.000,00 dengan dana yang bersumber dari APBN 2021. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan dalam pelaksanaan pengadaannya karena rawan akan tindakan penyelewengan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan peninjauan untuk mengetahui apakah pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut lagi, penulis ingin mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan jasa konstruksi tersebut sehingga menyebabkan dilakukannya evaluasi ulang terhadap objek pengadaan. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Rumah

Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung Tahun Anggaran 2021”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan penulis bahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021?
3. Apa saja yang menjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara serta solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui proses pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung.
2. Mengetahui perbandingan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

3. Mengetahui kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara serta solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan berfokus pada kesesuaian terkait pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, penulis juga akan meninjau kendala dan permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung selama proses pengadaan serta bagaimana penyelesaian dan solusi atas masalah tersebut.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam pengadaan jasa konstruksi bagi penulis maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penulis

dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dipelajari sebelumnya.

b. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta solusi mengenai permasalahan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kedepannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir. Bab pendahuluan ini terdiri dari subbab-subbab meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang masing-masing akan diuraikan secara rinci.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Di dalamnya akan berisi teori tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, pengertian pengadaan jasa pekerjaan konstruksi, pengertian rumah negara serta proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data. Kemudian pada bagian pembahasan diuraikan informasi tentang objek penulisan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung. Selain itu, pembahasan juga berisi tentang proses pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung dalam hal kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku serta kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam rangkaian prosesnya.

### BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan merupakan bagian terakhir dari KTTA ini. Bab ini akan berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis serta saran terkait permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan.